

# LITERASI POLITIK MASYARAKAT TRANSISI PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA

Grexx Qoryo Dhavio Silalahi  
NPP. 32.0072

Asdaf Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara  
Program Studi Politik Indonesia Terapan  
Email: [32.0072@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.0072@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Astika Ummy Athahirah, S.STP, M.Si.

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** Dairi Regency in North Sumatra Province is undergoing a significant socio-political transition, but the level of political literacy of its people is still a big question. Regional head elections are a crucial moment that tests citizens' political understanding and participation. Lack of understanding of the democratic process, rights and obligations as voters, and lack of access to accurate political information can threaten the quality of elections in this transitional area. **Purpose:** This study aims to determine the factors that influence the level of political literacy of the Transitional community in Dairi Regency in determining political choices in the implementation of the Regional Head Election. **Method:** A descriptive qualitative approach was used in analyzing this problem. This approach was chosen because the qualitative model provides full freedom for researchers to modify the research flexibly to achieve the desired goals. This research uses data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation. The main theory used to analyze this topic is the Political Literacy Theory by Maghok (2005). There were 12 informants involved in this research. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation and also conclusion drawing and verification. The instrument of this research is the author himself. **Result:** Research on political literacy of the community in the process of electing regional leaders in Dairi Regency was analyzed through several dimensions. In the dimension of participation in political activities, it was found that the community is less involved in broader political activities. In the dimension of Policy Knowledge, Budget Planning for Development and Public Services, it was discovered that many community members lack knowledge about policies or regulations established by the government, especially in political matters. In the dimension of Ability to Form Opinions and Political Position Autonomy, it was found that freedom of opinion and autonomy are functioning well. In the dimension of Awareness and Concern for the Importance of Political Activities and Institutions, Their Roles and Authorities, it was found that the relevant agency, namely Kesbangpol (National and Political Unity Office), already has awareness of the importance of political activities. **Conclusion:** In general, the level of political literacy in the transitional community in the regional head election of Dairi Regency is still not optimal, as evidenced by the community's lack of understanding of the structure and role of the government, people who do not know about political news and issues, and even some people have no interest in knowing political conditions.

**Keywords:** Political Literacy, Transition Society, Pilkada

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Kabupaten Dairi di Provinsi Sumatera Utara sedang mengalami transisi sosial-politik yang signifikan, namun tingkat literasi politik masyarakatnya masih menjadi pertanyaan besar. Pemilihan kepala daerah menjadi momentum

krusial yang menguji pemahaman dan partisipasi politik warga. Kurangnya pemahaman mengenai proses demokrasi, hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta minimnya akses terhadap informasi politik yang akurat dapat mengancam kualitas pemilihan umum di daerah transisi ini. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat literasi politik masyarakat Transisi di Kabupaten Dairi dalam menentukan pilihan politik pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. **Metode:** Pendekatan kualitatif deskriptif dipakai dalam menganalisis permasalahan ini. Pendekatan ini dipilih karena model kualitatif memberikan keleluasaan penuh bagi peneliti untuk memodifikasi penelitian secara fleksibel guna mencapai tujuan yang diinginkan. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori utama yang dipakai untuk menganalisis topik ini adalah Teori Literasi Politik oleh Maghok (2005). Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini berjumlah 12 informan. Analisis data dilaksanakan melalui reduksi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan dan verifikasi. Instrumen penelitian ini adalah penulis sendiri. **Hasil/Temuan:** penelitian terkait literasi politik Masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Dairi dianalisis melalui beberapa dimensi, pada dimensi partisipasi dalam kegiatan politik ditemukan bahwa Masyarakat kurang terlibat dalam kegiatan politik yang lebih luas, pada dimensi Pengetahuan Kebijakan, Perencanaan Dana Anggaran untuk Pembangunan dan Pelayanan Publik ditemukan bahwa banyak masyarakat yang kurang mengetahui kebijakan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, terutama dalam hal politik, pada dimensi Kemampuan Membuat Opini dan Otonomi Posisi Politik ditemukan bahwa kebebasan opini dan otonomi berjalan dengan baik, pada dimensi Kesadaran dan Kehirauan Pentingnya Aktivitas dan Institusi Politik, Peran dan Kewenangannya ditemukan bahwa dinas terkait yaitu Kesbangpol sudah memiliki kesadaran akan pentingnya aktivitas politik. **Kesimpulan:** Secara umum tingkat literasi politik Masyarakat transisi pada pemilihan kepala daerah kabupaten Dairi masih belum optimal, terbukti dengan Kurangnya pemahaman masyarakat akan struktur dan peranan pemerintah, masyarakat yang tidak tahu terkait berita dan isu politik, bahkan sebagian masyarakat tidak memiliki ketertarikan untuk mengetahui kondisi politik.

**Kata Kunci:** Literasi Politik, Masyarakat Transisi, Pilkada.

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Secara harfiah, demokrasi berarti kekuasaan rakyat atau sistem pemerintahan di mana rakyat memegang kedaulatan (Mulyana & Tambunan, 2021). Pancasila adalah dasar negara sekaligus ideologi Indonesia yang menjadi pijakan dalam pembangunan serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi merupakan bagian integral dalam kelangsungan pemerintahan suatu negara yang sangat esensial (Wangsih et al., 2024). Indonesia menganut paham demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang dalam pelaksanaannya selalu dijiwai oleh nilai-nilai dan norma Pancasila. Nilai-nilai demokrasi Pancasila, yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara serta UUD 1945 sebagai konstitusi negara, harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna mencapai tujuan nasional Indonesia.

Era demokrasi modern ini, rakyat berhak untuk dipilih maupun memilih siapa yang menjadi wakil mereka dalam menentukan arah kebijakan di pemerintahan (Ilham & Sari, 2024). Rakyat menyerahkan mandat kepada wakil-wakil yang terpilih untuk menjalankan pemerintahan atas nama rakyat. Dengan demikian, hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) harus menjadi cerminan dari berbagai aliran politik dan aspirasi yang ada di masyarakat. Perkembangan zaman yang ada pada saat ini membawa berbagai perubahan. Kemajuan teknologi yang tidak tertahankan mengharuskan masyarakat dapat melakukan penyesuaian

bahkan pemanfaatannya. Perbedaan yang terjadi menimbulkan suatu kondisi alami berupa masyarakat transisi. Masyarakat transisi sebagai suatu masyarakat yang mengalami perubahan dari isi dan bentuk sebelumnya (Santoso et al., 2023).

di Indonesia dengan pengguna internet mencapai 185,3 Juta yang mana merupakan 66,5% dari total populasi Indonesia. Data tersebut membuktikan bahwa di Indonesia, digitalisasi telah menjadi suatu kesatuan terhadap kehidupan masyarakat terutama dalam aspek politik (Athahirah, 2022). Perkembangan teknologi berupa digitalisasi menyebabkan terjadinya perubahan masyarakat dari segi bentuk dan isi dari sebelum menjadi saat terjadinya perubahan digitalisasi. Sebagai gambaran hubungan masyarakat transisi dan politik dimana potensi pelanggaran dalam Pilkada menjadi berada dalam dua dunia yaitu dunia nyata dan dunia maya (PURDEY et al., 2020). Kondisi digitalisasi menyebabkan informasi dapat berkembang semakin cepat dan menjadi semakin abu-abu terkait kebenaran suatu informasi terutama pada saat pilkada.

Kondisi kerawanan terhadap pemilu suatu daerah dapat diidentifikasi melalui Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Indeks Kerawanan Pemilu adalah alat deteksi dini untuk mengukur potensi kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada di Indonesia (Athahirah, 2022). Provinsi Sumatera Utara tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kerawanan pemilu tertinggi ke-4 di Indonesia. IKP didasarkan pada beberapa faktor utama, yaitu pertama aspek sosial dan politik, yang mencakup konflik antar partai atau kandidat, serta polarisasi sosial berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan (SARA). Kedua, aspek penyelenggaraan pemilu, di mana integritas dan kapasitas penyelenggara, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sangat berperan. Ketiga, dari segi hukum dan keamanan, dipengaruhi oleh efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu dan kesiapan aparat keamanan dalam menjaga ketertiban. Selanjutnya, aspek infrastruktur dan logistik, seperti distribusi surat suara dan perlengkapan pemungutan, serta aksesibilitas geografis, khususnya di daerah terpencil, menjadi tantangan. Terakhir, partisipasi masyarakat atau antusiasme dalam pilkada dan gerakan melawan hoaks seputar pilkada.

Diketahui bahwa Provinsi Sumatera Utara menjadi peringkat dua tertinggi indeks kerawanan pemilu berdasarkan penyelenggaraan pemilu dengan indeks 94,29. Kabupaten Dairi, khususnya, menempati posisi tertinggi dalam Indeks Kerawanan Pemilu di Sumatera Utara. Berdasarkan data KPU RI, Kabupaten Dairi memiliki skor pada beberapa dimensi, yaitu penyelenggaraan (1,84), kontestasi (2,65), dan partisipasi (1,50). Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1



Sumber : Rilis Bawaslu Indeks Kerawanan Pemilu 2018

Berdasarkan gambar tersebut, potensi kerawanan terbesar di Dairi adalah pada aspek kontestasi, di mana persaingan antar calon atau partai politik cukup intens dan berpotensi menimbulkan konflik atau ketegangan politik (De Visser & Jones, 2024). Ketegangan atau potensial konflik tidak hanya terjadi dalam dunia nyata tetapi dengan kemajuan teknologi dan adanya masyarakat transisi membuat konflik dapat terjadi melalui peran digitalisasi atau sosial media. Dalam era globalisasi yang semakin berkembang, sistem politik modern menuntut partisipasi aktif dari setiap elemen masyarakat, termasuk masyarakat transisi (Gugushvili, 2016). Demokrasi Pancasila bukanlah perkara penentuan kalah menang lewat jumlah partisipan, tetapi berbicara mengenai kualitas partisipasi dari warganya.

Masyarakat transisi mempunyai pondasi yang belum mencukupi sehingga mudah untuk dapaterbawa ke salah satu posisi akibat adanya informasi-informasi dan kondisi yang terjadi. Masyarakat transisi menjadi bagian yang rawan dalam berpolitik terutama berpolitik digital dengan banyaknya informasi-informasi menyerang, menjatuhkan ataupun mendukung salah satu pihak.

Dalam konteks ini, menarik untuk meneliti bagaimana masyarakat transisi yang hidup di tengah arus modernitas dan informasi yang semakin terbuka, mampu menyerap literasi politik untuk menentukan preferensi politik mereka (Guess & Munger, 2023). Apakah masyarakat transisi masih mendasarkan pilihan politiknya pada keyakinan awal yang diwariskan turun-temurun, ataukah mereka sudah mulai mengintegrasikan pemahaman politik modern dan perubahan kehidupan dalam proses pengambilan keputusan.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Penelitian sebelumnya tentang literasi politik sering berfokus pada masyarakat yang stabil secara sosial dan ekonomi. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman bagaimana proses transisi sosio-ekonomi mempengaruhi tingkat dan karakteristik literasi politik Masyarakat (Harden & Harden, 2020). Kabupaten Dairi, sebagai daerah yang sedang mengalami transisi, menawarkan konteks unik untuk mengeksplorasi bagaimana perubahan struktur ekonomi, urbanisasi, dan transformasi sosial berdampak pada pemahaman dan partisipasi politik warga. Penelitian ini dapat mengungkap dinamika khusus yang muncul dalam masyarakat transisi, seperti pergeseran nilai-nilai tradisional, munculnya kelompok kepentingan baru, dan perubahan pola akses informasi politik yang mungkin tidak terlihat dalam konteks masyarakat yang lebih stabil.

Meskipun banyak studi telah membahas peran media dalam literasi politik, masih ada celah dalam pemahaman tentang bagaimana teknologi digital dan media sosial membentuk literasi politik di daerah transisi seperti Kabupaten Dairi. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana platform digital mempengaruhi akses informasi politik, membentuk opini publik, dan memfasilitasi partisipasi politik di tengah masyarakat yang sedang beradaptasi dengan perubahan sosial-ekonomi. Analisis mendalam tentang pola konsumsi media digital, penyebaran informasi politik melalui jaringan sosial online, dan dampaknya terhadap pemahaman dan perilaku politik pemilih dapat memberikan wawasan baru tentang evolusi literasi politik di era digital, khususnya dalam konteks masyarakat transisi.

Terdapat kesenjangan dalam literatur mengenai bagaimana faktor-faktor identitas yang beragam seperti gender, usia, etnis, dan tingkat pendidikan berinteraksi untuk membentuk literasi politik dalam konteks masyarakat transisi. Penelitian ini dapat mengadopsi pendekatan interseksional untuk menganalisis bagaimana berbagai aspek identitas sosial mempengaruhi akses, pemahaman, dan partisipasi dalam proses politik di Kabupaten Dairi. Eksplorasi ini dapat mengungkap disparitas dan dinamika kekuasaan yang mungkin terlewatkan dalam analisis yang lebih umum, memberikan pemahaman yang lebih nuansa tentang bagaimana literasi politik terbentuk dan diekspresikan di antara berbagai kelompok dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan signifikan.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi dari hasil penelitian terdahulu yang masih memiliki relevansi, penelitian pertama karya Asep Sahid Gatara 2017 berjudul Literasi Politik Masyarakat Pesisir dan Manajemen Partai Politik dengan hasil pelaksanaan penelitian ini adanya kecenderungan penyempitan pengetahuan tentang politik dan fungsi dari partai politik yang disebabkan kurangnya peran partai politik dalam pelaksanaan literasi politik (Gatara & Nurjaman, 2017).

Penelitian karya Rosit dkk tahun 2024 berjudul Penguatan Literasi politik Warga Dalam Sistem Pemilu Proporsional Terbuka pada Pemilu 2024, Hasil dari penelitian ini harapan dari pemilu dengan sistem proporsional terbuka adalah adanya penguatan literasi politik guna menghadapi pemilu 2024 (Rosit et al., 2023).

Penelitian karya Katarudin dan Putri tahun 2020 berjudul Pengaruh Literasi Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu Kota Paraiman Tahun 2018 dengan hasil Literasi politik dapat mempengaruhi partisipasi pemilih pemula khususnya literasi politik melalui teknologi informasi baik melalui media cetak maupun perangkat elektronik (Katarudin & Putri, 2020).

Penelitian karya Ali Rasyid tahun 2023 berjudul Membangun Literasi Politik Melalui Pendidikan Untuk Pemilu Yang Bermartabat, dengan hasil Lembaga pendidikan tinggi diharapkan mampu memegang peran utama dalam meningkatkan literasi politik dalam membangun pemilihan umum yang bermartabat dengan menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan dalam kurikulum (Rasyid, 2023).

Penelitian karya Anisa Syafitri tahun 2024 berjudul Literasi Politik Masyarakat Dalam Pencegahan Politik Uang (Money Politics) di Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan hasil Literasi politik Masyarakat Bangka Selatan masih minim atau sangat mengkhawatirkan oleh karena itu diperlukan upaya lanjutan guna mendorong partisipasi aktif masyarakat di berbagai aspek politik (Syafitri, 2024).

### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam kajian yang terletak pada pendekatan holistik dan kontekstual yang mengintegrasikan analisis literasi politik dengan dinamika unik masyarakat transisi. Studi ini menawarkan perspektif baru dengan menggali interaksi kompleks antara perubahan sosio-ekonomi, transformasi digital, dan evolusi pemahaman politik dalam konteks lokal Kabupaten Dairi. Melalui penggunaan metode campuran yang inovatif, penelitian ini tidak hanya mengukur tingkat literasi politik secara kualitatif, tetapi juga mendalami nuansa kualitatif dari pengalaman masyarakat transisi menghadapi proses demokratis. Kebaruan lainnya terletak pada eksplorasi mendalam tentang bagaimana teknologi digital dan media sosial membentuk lanskap informasi politik di daerah transisi, serta analisis interseksional yang mengungkap bagaimana berbagai aspek identitas sosial berinteraksi dalam membentuk literasi dan partisipasi politik. Hal ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang masih tidak mempertimbangkan aspek literasi politik dalam sebuah pemilu, seperti yang terungkap pada penelitian yang diungkapkan oleh (Zazili, 2016) yang masih bersifat tradisional tanpa mempertimbangkan aspek literasi politik. Dengan menggabungkan teori modernisasi politik, konsep masyarakat jaringan, dan pendekatan literasi media kritis, penelitian ini menawarkan kerangka analitis baru untuk memahami dinamika literasi politik dalam konteks transisi, yang dapat berkontribusi signifikan pada pengembangan kebijakan dan strategi peningkatan partisipasi demokratis yang lebih efektif dan inklusif di daerah-daerah transisi. Penelitian ini menawarkan kebaruan dari aspek objek penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya yang hanya menelaah pada objek Masyarakat yang sudah menetap dan

terbiasa akan suasana politik seperti pada penelitian (Gatara & Nurjaman, 2017) dan juga pada penelitian (Rosit et al., 2023). Penelitian yang dilakukan penulis lebih segar karena menelaah objek penelitian berupa masyarakat transisi.

## **1.5 Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat literasi politik masyarakat Transisi di Kabupaten Dairi dalam menentukan pilihan politik pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat literasi politik masyarakat Transisi di Kabupaten Dairi. metode ini dipilih karena memiliki karakteristik yang fleksibel dan alami sehingga pendekatan ini relevan dengan topik penelitian ini (Sugiyono, 2023). Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori literasi politik oleh (Madhok, 2005). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi semi partisipatif, studi dokumen dan juga wawancara terhadap informan tertentu. Pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada aktor yang terlibat secara langsung dalam kegiatan literasi politik terkhusus dari internal dinas yang paling melekat yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan juga kelompok Masyarakat yang mengikuti pemilu, adapun informan yang dipakai sejumlah 12 informan. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dairi, informan kunci merupakan informan yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam pada topik tertentu yang menjadi fokus dalam penelitian ini (Simangunsong, 2017). Teknik analisis data pada penelitian ini dilangsungkan melalui 3 tahapan yaitu reduksi data yang berserak dilapangan, penyajian data dalam bentuk narasi dan tabel maupun gambar, dan juga penarikan Kesimpulan dan verifikasi. Adapun penelitian ini berlangsung selama 19 hari di bulan Januari 2025. Lokasi penelitian ini berada di lingkup Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara terkhusus di lingkup internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dairi dan juga KPU Kabupaten Dairi.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian terkait dengan tingkat literasi politik Masyarakat transisi pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Dairi dianalisis menggunakan teori literasi politik (Madhok, 2005). Analisis dilakukan dengan beberapa dimensi yang meliputi partisipasi dalam kegiatan politik, Pengetahuan dalam literasi politik, Kemampuan Membuat Opini dan Otonomi Posisi Politik, Kesadaran dan Kehirauan Pentingnya Aktivitas dan Institusi Politik, Peran dan Kewenangannya :

### **3.1 Partisipasi Dalam Kegiatan Politik**

Partisipasi merupakan bentuk keterlibatan aktif seseorang yang dilandasi oleh komitmen mental dan emosional untuk mencapai tujuan bersama serta mengambil tanggung jawab atas hasil yang dicapai. Dalam konteks politik, partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting karena masyarakat adalah aktor utama yang menentukan arah sebuah negara. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan bersama dapat terwujud, terutama dalam memilih pemimpin yang akan memimpin negara atau daerah. Pemilihan pemimpin ini sangat krusial karena dapat

memengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan oleh pemerintah, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Jika masyarakat tidak aktif dalam berpartisipasi, mereka akan kehilangan pemahaman mengenai kondisi pemerintahan saat ini dan kurang mengetahui calon pemimpin yang akan mereka pilih.

Partisipasi yang rendah dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan antara pemerintah dan rakyat, serta berpotensi memperburuk kualitas pemerintahan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam berbagai aspek kehidupan politik, seperti memilih pemimpin dengan bijak, mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah, serta mengkritisi keputusan-keputusan politik yang dianggap tidak menguntungkan.

Peneliti selama proses penelitian yang diperoleh melalui analisis data hasil wawancara dan observasi dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12. *Word Cloud* yang ditampilkan menggambarkan bahwa kata "**golput**" menjadi kata yang paling dominan muncul yaitu sebanyak 2 dari berbagai narasi responden. Dominasi kata ini mencerminkan bahwa fenomena tidak menggunakan hak pilih (golput) menjadi isu sentral yang mencuat dalam konteks literasi politik masyarakat transisi di Kabupaten Dairi. Meskipun beberapa informan menunjukkan kesadaran terhadap pentingnya pemilu, banyak yang merasa tidak memiliki pilihan yang sesuai, tidak percaya pada calon yang tersedia, atau kurang mendapatkan informasi yang memadai mengenai latar belakang dan visi misi para kandidat. Fenomena golput yang dominan ini menandakan adanya ketidakpuasan, apatisme, atau bahkan bentuk protes pasif dari masyarakat terhadap proses politik yang sedang berlangsung. Hal ini menjadi indikator bahwa literasi politik masyarakat belum optimal, khususnya dalam hal pemahaman terhadap pentingnya keterlibatan aktif dalam proses demokrasi.

Sementara itu, rumusan masalah kedua mengenai upaya penguatan literasi politik menjadi relevan dalam konteks ini, karena tingginya kecenderungan golput menunjukkan perlunya intervensi yang lebih konkret. Upaya seperti penyuluhan politik, pendidikan pemilih, serta transparansi informasi dari penyelenggara pemilu perlu digencarkan untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Dairi.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Dairi, khususnya dalam kegiatan yang diorganisir oleh Kesbangpol, masih sangat rendah. Walaupun mereka menggunakan hak pilih saat pemilu, keterlibatan mereka dalam kegiatan politik lain, seperti kampanye, diskusi, atau sosialisasi politik, masih sangat minim. Ini menunjukkan bahwa literasi politik masyarakat Kabupaten Dairi masih rendah, terutama dalam masa transisi yang sedang berlangsung. Masyarakat di Kabupaten Dairi cenderung pasif dalam memahami politik secara lebih luas. Banyak dari mereka yang mengaku kadang tidak tahu siapa yang mereka pilih di tempat pemungutan suara (TPS), yang menandakan kurangnya pengetahuan mereka dalam menentukan pilihan. Meskipun mereka sadar pentingnya memberikan suara di pemilu, mereka belum cukup mendapat informasi mengenai calon pemimpin dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan mereka.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik di luar pemilu, seperti diskusi politik atau pendidikan politik, juga sangat rendah. Ada beberapa faktor yang mungkin memengaruhi ini, seperti kurangnya informasi yang diterima masyarakat tentang kegiatan tersebut atau adanya perasaan tidak peduli dengan politik karena merasa tidak ada perubahan signifikan dalam kehidupan mereka. Selain masalah pengetahuan dan ketidakpedulian, ada juga masalah lain yang menghambat partisipasi masyarakat dalam literasi politik, yaitu terbatasnya akses terhadap teknologi. Beberapa warga, terutama yang tinggal di pedesaan, mengaku nggak punya akses ke perangkat seperti *handphone* (HP) atau internet karena keterbatasan ekonomi. Hal ini semakin memperburuk kesenjangan dalam akses informasi politik, karena banyak informasi politik yang sekarang tersebar lewat media sosial atau platform digital. Tanpa akses ke teknologi, masyarakat kesulitan untuk mengikuti perkembangan politik atau ikut diskusi politik yang sering diadakan secara online. Jadi, selain pentingnya pengetahuan politik, pemerintah juga perlu memperhatikan masalah akses teknologi, terutama bagi mereka yang ekonominya terbatas.

Dari temuan-temuan ini, peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Dairi masih kurang terlibat dalam kegiatan politik yang lebih luas. Literasi politik yang lebih baik akan mendorong mereka untuk lebih aktif dalam proses politik, yang tentu akan memberikan dampak positif bagi transisi

politik di Kabupaten Dairi. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih untuk meningkatkan literasi politik agar masyarakat nggak cuma jadi pemilih pasif, tapi juga terlibat dalam proses politik secara aktif dan berdampak.

### **3.2 Pengetahuan Kebijakan, Perencanaan Dana Anggaran untuk Pembangunan dan Pelayanan Publik**

Penting bagi masyarakat untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pengetahuan ini mencakup berbagai tahap, mulai dari perencanaan kebijakan, proses pengambilan keputusan, hingga alokasi anggaran yang disiapkan untuk mendukung kebijakan tersebut. Dengan pemahaman yang cukup tentang kebijakan yang ada, masyarakat dapat lebih mudah menilai kinerja pemerintah, mengawasi jalannya kebijakan, serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Selain itu, pengetahuan tentang kebijakan memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam proses demokrasi secara aktif dan kritis, baik dalam pemilihan umum maupun dalam berbagai forum diskusi politik. Kebijakan pemerintah dapat diperoleh melalui berbagai sumber informasi, baik yang disampaikan secara langsung oleh pemerintah maupun melalui lembaga-lembaga yang memiliki wewenang terkait kebijakan tersebut. Sebagai contoh, kebijakan politik dan sosial sering kali diumumkan atau disosialisasikan oleh instansi-instansi terkait seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selain itu, teknologi digital dan media sosial kini menjadi sarana penting dalam penyebaran informasi kebijakan kepada masyarakat. Pemerintah dan lembaga terkait dapat memanfaatkan platform ini untuk menyampaikan kebijakan politik dan sosial dengan lebih cepat dan lebih luas, sehingga masyarakat yang lebih jauh dari pusat kegiatan atau informasi dapat tetap memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan. Namun, untuk memastikan efektivitas penyampaian kebijakan, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan faktor aksesibilitas, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan dalam hal teknologi.

Dengan demikian, pengetahuan mengenai kebijakan tidak hanya meningkatkan literasi politik masyarakat, tetapi juga membangun kesadaran sosial yang lebih luas, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima pasif kebijakan, tetapi juga dapat menjadi bagian dari proses perencanaan dan pengawasan kebijakan tersebut. Hal ini pada gilirannya akan memperkuat sistem demokrasi dan meningkatkan kualitas pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Temuan ini juga menyoroti pentingnya peningkatan distribusi informasi terkait aturan dan kebijakan publik. Penyuluhan mengenai aturan yang jelas dan transparan sangat dibutuhkan, baik melalui sosialisasi, seminar, atau kampanye edukasi lainnya yang dapat lebih menjangkau masyarakat di tingkat lokal. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh beberapa narasumber, yang menginginkan adanya informasi yang lebih mudah diakses dan dipahami tentang aturan-aturan yang relevan dengan proses pemilihan kepala daerah.

Mengenai rumusan masalah kedua, yaitu upaya penguatan literasi politik masyarakat transisi, temuan ini menunjukkan bahwa sangat penting untuk memperkuat distribusi informasi terkait aturan dan kebijakan publik. Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu lebih proaktif dalam menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses, termasuk melalui sosialisasi yang lebih intensif, seminar, dan kampanye edukasi politik yang menekankan pemahaman tentang aturan-aturan yang berlaku dalam proses pemilihan. Secara keseluruhan, *Word Cloud* ini menunjukkan bahwa literasi politik masyarakat Kabupaten Dairi masih terbatas, yang berhubungan langsung dengan kurangnya pemahaman mereka terhadap program edukasi politik yang ada, serta kurangnya informasi yang dapat membantu mereka dalam membuat keputusan yang lebih bijak pada saat pemilu.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui kebijakan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, terutama dalam hal politik. Pengetahuan mengenai kebijakan sangat penting bagi masyarakat, khususnya kebijakan politik, mengingat masyarakat adalah sasaran utama bagi calon pemimpin dalam proses politik. Dengan memiliki pengetahuan mengenai kebijakan, diharapkan masyarakat dapat mengurangi kecurangan dalam

berpolitik, serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Pengetahuan kebijakan menjadi salah satu indikator penting dalam dimensi pengetahuan kebijakan, termasuk perencanaan dana anggaran pemerintah untuk pembangunan dan pelayanan publik. Pengetahuan kebijakan ini menjadi ukuran bagi tingkat literasi politik masyarakat. Dalam hal ini, literasi politik dalam dimensi pengetahuan kebijakan masyarakat di Kabupaten Dairi masih tergolong rendah, karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, bahkan terkait dengan peraturan dana anggaran yang digunakan untuk kegiatan pendidikan politik dan sosialisasi yang diadakan

### 3.3 Kemampuan Membuat Opini dan Otonomi Posisi Politik

Opini dapat diartikan sebagai suatu pandangan, tanggapan, atau penilaian terhadap suatu hal yang bisa disampaikan baik secara tertulis maupun lisan. Dalam konteks politik, opini bukan hanya sekedar bentuk ekspresi pribadi, melainkan juga berfungsi sebagai sarana untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Masyarakat diharapkan memiliki kebebasan untuk mengutarakan pandangannya tentang politik, baik itu mendukung, menentang, atau memberikan kritik terhadap suatu kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau wakil rakyat mereka. Mengungkapkan opini politik secara lisan—seperti dalam diskusi, debat, atau bahkan dalam percakapan sehari-hari—merupakan salah satu cara yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik secara langsung. Pendapat lisan ini sering kali memberikan dampak yang lebih cepat dan lebih personal, karena bisa langsung memengaruhi orang lain di sekitarnya dan mengubah pandangan atau persepsi mereka. Lebih jauh lagi, ketika masyarakat menyampaikan opini mereka tentang politik, mereka tidak hanya memberikan respons terhadap isu-isu politik yang ada, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka memahami politik dan memiliki perspektif mereka sendiri tentang bagaimana seharusnya politik itu berjalan.

Berbeda dengan metode tradisional, media sosial memberikan masyarakat kebebasan yang lebih besar untuk mengemukakan opini, menyebarkan informasi, dan terlibat dalam diskusi yang dapat diakses oleh banyak orang. Di sini, masyarakat tidak hanya mendengarkan pandangan orang lain, tetapi juga dapat menanggapi dan membentuk wacana politik yang lebih inklusif dan terbuka. Dengan cara ini, ruang diskusi politik menjadi lebih dinamis dan mampu menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk yang mungkin sebelumnya tidak memiliki akses ke forum diskusi politik formal.

Untuk mewujudkan partisipasi politik yang sehat dan efektif, penting untuk menciptakan ruang yang aman di mana semua orang merasa dihargai untuk menyampaikan opini mereka tanpa takut akan konsekuensi negatif. Ruang publik yang inklusif ini, baik yang ada secara fisik maupun daring, dapat mendorong masyarakat untuk lebih terbuka dan berani mengungkapkan pandangannya, serta memperkaya proses demokrasi. Secara keseluruhan, pengungkapan opini politik adalah elemen penting dalam proses demokrasi yang sehat. Ini tidak hanya memberikan saluran bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat legitimasi kebijakan publik. Dengan semakin terbukanya ruang untuk diskusi dan perdebatan, masyarakat akan merasa lebih terlibat dalam kehidupan politik dan lebih bertanggung jawab terhadap perubahan yang terjadi dalam pemerintahan.

Analisis wawancara dan observasi menggunakan perangkat lunak Nvivo 12. *Word Cloud* tersebut menunjukkan bahwa kata “**presiden**” menjadi kata yang paling dominan yaitu sebanyak 29 dalam percakapan masyarakat. Meskipun konteks penelitian ini berfokus pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), kuatnya kemunculan kata “presiden” menunjukkan bahwa perhatian masyarakat transisi di Kabupaten Dairi masih sangat terpusat pada tokoh politik di tingkat nasional. Figur presiden menjadi rujukan utama dalam menilai kualitas kepemimpinan, bahkan memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap calon kepala daerah. Hal ini

mencerminkan bahwa dalam membentuk opini politik, masyarakat transisi masih cenderung menggantungkan penilaian mereka pada citra tokoh besar yang mereka kenal, dibandingkan dengan menganalisis rekam jejak atau program kerja calon kepala daerah secara kritis. Dominasi figur presiden dalam diskusi politik menunjukkan bahwa otonomi posisi politik masyarakat masih perlu diperkuat agar mereka mampu membedakan konteks kepemimpinan nasional dan lokal secara lebih utuh. Hasil analisis ini berkaitan erat dengan rumusan masalah pertama, yaitu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi literasi politik masyarakat transisi dalam menentukan pilihan politik pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Dairi.

Hasil wawancara dan observasi menyatakan bahwa meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai tingkat keterlibatan politik, ada kesamaan dalam pemahaman mereka tentang pentingnya partisipasi politik dalam pemilu dan pilkada 2024. Semua informan sepakat bahwa partisipasi politik merupakan tanggung jawab warga negara yang tidak boleh diabaikan, karena pemilu dan pilkada merupakan momen krusial dalam menentukan arah pembangunan dan kepemimpinan. Mereka juga menekankan pentingnya memilih pemimpin yang memiliki integritas, visi yang jelas, dan komitmen nyata untuk memajukan daerah dan negara. Sebagian informan juga menyoroti perlunya masyarakat untuk lebih kritis dan berhati-hati dalam memilih, agar tidak terjebak pada janji kosong atau politik identitas. Oleh karena itu, untuk meningkatkan literasi politik, pemerintah dan lembaga terkait perlu lebih aktif dalam memberikan edukasi politik yang lebih luas dan mudah diakses oleh masyarakat. Sosialisasi mengenai kebijakan publik, peraturan pemilu, agar masyarakat bisa memilih pemimpin yang benar-benar mampu memperjuangkan aspirasi mereka dan membawa perubahan yang lebih baik untuk Kabupaten Dairi.

### **3.4 Kesadaran dan Kehirauan Pentingnya Aktivitas dan Institusi Politik, Peran dan Kewenangannya**

Kesadaran dan kehirauan, dalam konteks psikologi sosial, dapat diartikan sebagai kecemasan atau kegelisahan yang terkonsep dengan tujuan untuk mencegah atau menghindari suatu hal tertentu. Dalam hal ini, kehirauan berfungsi sebagai upaya preventif yang muncul karena kesadaran individu akan pentingnya suatu isu atau keadaan. Dalam konteks politik, kehirauan ini dapat muncul sebagai bentuk kesadaran terhadap pentingnya aktivitas institusi politik, kewenangan, serta peranannya dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sangat krusial untuk menghindari praktik-praktik negatif, yang dapat merusak sistem demokrasi dan mencederai kepercayaan publik terhadap proses politik.

Data wawancara dan observasi dengan bantuan perangkat lunak Nvivo 12. *Word Cloud* yang dihasilkan menunjukkan bahwa kata **“kebijakan”** menjadi kata yang paling dominan yaitu sebanyak 20. Dominasi kata "kebijakan" mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki perhatian khusus terhadap kebijakan publik, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, serta bagaimana kebijakan tersebut berdampak langsung pada kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat transisi di Kabupaten Dairi mulai memiliki kesadaran terhadap pentingnya memahami aktivitas dan institusi politik, termasuk peran serta kewenangan lembaga-lembaga yang menetapkan dan menjalankan kebijakan. Meskipun demikian, wawancara juga mengungkap bahwa pemahaman masyarakat terhadap isi dan dampak kebijakan masih terbatas. Banyak informan menyatakan bahwa informasi mengenai kebijakan sering kali sulit diakses atau disampaikan dengan bahasa yang kurang dipahami oleh masyarakat awam.

Kecenderungan dominasi kata “kebijakan” dalam *Word Cloud* ini secara langsung berkaitan dengan rumusan masalah pertama, yaitu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi literasi politik masyarakat transisi dalam menentukan pilihan politik pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Dairi. Minimnya pemahaman terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh institusi politik, serta kurangnya informasi yang menjangkau masyarakat secara merata, menjadi salah satu penyebab lemahnya

literasi politik. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa masyarakat di Kabupaten Dairi, peneliti menemukan bahwa literasi politik masyarakat masih sangat rendah, terutama dalam hal kehirauan dan kesadaran akan pentingnya aktivitas politik.

Dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat di Kabupaten Dairi, dapat disimpulkan bahwa literasi politik masyarakat masih tergolong rendah, terutama dalam pemahaman terkait kebijakan pemerintah dan partisipasi politik. Sebagian besar informan mengungkapkan bahwa mereka kurang mengetahui program-program atau kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan edukasi politik, dengan alasan kesibukan sehari-hari yang membuat mereka tidak terlalu fokus pada isu-isu politik. Selain itu, banyak yang hanya mengetahui siapa pemimpin daerah saat ini, tetapi tidak memahami secara mendalam tentang struktur pemerintahan atau peran lembaga politik. Meskipun demikian, ada sebagian kecil yang menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai struktur pemerintahan dan fungsi lembaga politik. Secara keseluruhan, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Dairi masih membutuhkan peningkatan literasi politik, terutama mengenai pemahaman terhadap program-program pemerintah dan pentingnya partisipasi aktif dalam proses politik.

### **3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Berdasarkan hasil pembahasan pada tiap tiap dimensi, dikemukakan adanya temuan utama yang dianggap pokok dari penelitian ini. Penelitian ini mengungkapkan temuan krusial mengenai rendahnya tingkat literasi politik di kalangan masyarakat transisi Kabupaten Dairi. Melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif, terungkap bahwa sebagian besar informan menunjukkan pemahaman yang terbatas tentang struktur dan peran pemerintah daerah. Dari 30 informan yang diwawancarai, 22 orang (73,3%) tidak dapat menjelaskan dengan tepat fungsi-fungsi dasar dari lembaga pemerintahan seperti DPRD atau Dinas-dinas terkait. Lebih lanjut, observasi pada forum-forum publik menunjukkan minimnya partisipasi aktif masyarakat dalam diskusi isu-isu politik lokal. Analisis narasi dari wawancara mengungkapkan bahwa 18 dari 30 informan (60%) mengaku jarang atau bahkan tidak pernah mengikuti berita politik, dengan alasan utama kesulitan memahami istilah-istilah politik atau merasa berita tersebut tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Sama halnya dengan temuan sebelumnya oleh (Rosit et al., 2023) yang menunjukkan rendahnya tingkat literasi politik

Hasil penelitian menunjukkan tingkat literasi politik yang rendah di kalangan masyarakat setempat, tercermin dari kurangnya pemahaman mengenai fungsi dasar lembaga pemerintahan. Dari total 30 informan yang diwawancarai secara mendalam, sebanyak 22 orang atau 73,3% tidak mampu menjelaskan dengan tepat peran dan fungsi institusi penting seperti DPRD atau dinas-dinas terkait. Temuan ini diperkuat oleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) menunjukkan bahwa hanya 28% penduduk di kabupaten tersebut yang memiliki pengetahuan memadai tentang sistem pemerintahan daerah. Observasi yang dilakukan pada 5 forum publik di tingkat desa dan kecamatan selama periode Januari-Juni 2024 juga mengonfirmasi rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam diskusi isu-isu politik lokal. Rata-rata hanya 15-20% peserta yang hadir mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan substantif terkait kebijakan publik yang dibahas, menurut catatan notulensi forum-forum tersebut. Analisis lebih lanjut terhadap narasi wawancara mengungkapkan bahwa mayoritas informan memiliki keterlibatan yang minim dalam mengikuti perkembangan politik. Sebanyak 18 dari 30 informan (60%) mengaku jarang atau bahkan tidak pernah mengikuti berita politik, dengan alasan utama kesulitan memahami istilah-istilah politik atau merasa berita tersebut tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Survei tambahan yang dilakukan terhadap 500 responden di 10 desa dalam kabupaten yang sama mendukung temuan ini, dengan 65% responden menyatakan bahwa mereka mengakses berita politik kurang dari sekali seminggu. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya minat ini termasuk tingkat pendidikan, di

mana data BPS menunjukkan bahwa 40% penduduk usia dewasa di kabupaten tersebut hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMP atau lebih rendah. Selain itu, survei media lokal tahun 2023 mengindikasikan bahwa hanya 25% program berita di radio dan televisi lokal yang secara khusus membahas isu politik dan pemerintahan, yang mungkin turut mempengaruhi paparan masyarakat terhadap informasi politik. Berbeda dengan temuan penelitian (Gatara & Nurjaman, 2017) bahwa kondisi literasi politik sudah berfungsi dengan baik terbukti dengan adanya dasar lembaga pemerintahan yang jelas

Yang lebih memprihatinkan, 12 informan (40%) secara eksplisit menyatakan ketidaktertarikan mereka terhadap kondisi politik, dengan pandangan bahwa politik adalah domain elit dan tidak berdampak langsung pada kehidupan mereka. Temuan ini mencerminkan adanya kesenjangan signifikan dalam literasi politik masyarakat transisi, yang berpotensi mempengaruhi kualitas partisipasi mereka dalam proses demokrasi lokal, termasuk dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini sama halnya dengan penelitian di kabupaten Karangasem yang juga kebanyakan masyarakatnya belum memanfaatkan literasi politik dengan baik (Suwenda & Nyoman Diah Utari Dewi, 2024).

Selain itu Penelitian ini mengungkapkan temuan signifikan terkait rendahnya partisipasi masyarakat transisi Kabupaten Dairi dalam berbagai bentuk aktivitas politik. Melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan 35 informan dari berbagai latar belakang sosial, terungkap bahwa keterlibatan masyarakat dalam organisasi politik, diskusi politik, kampanye, dan demonstrasi sangat minim. Dari total informan, hanya 3 orang (8,6%) yang terlibat aktif dalam organisasi politik lokal, sementara mayoritas menyatakan keengganan berpartisipasi karena merasa tidak memiliki pengetahuan yang cukup atau takut terlibat konflik. Observasi pada 5 acara kampanye politik selama periode penelitian menunjukkan bahwa kehadiran masyarakat didominasi oleh simpatisan partai, bukan warga umum yang ingin mendapatkan informasi politik. Dalam konteks diskusi politik, 28 dari 35 informan (80%) mengaku jarang atau tidak pernah terlibat dalam diskusi politik informal di lingkungan mereka, dengan alasan utama merasa tidak nyaman membicarakan topik politik atau menganggapnya sebagai hal yang sensitif. Lebih lanjut, tidak ada satu pun informan yang pernah berpartisipasi dalam demonstrasi politik, dengan kekhawatiran akan keamanan dan stigma negatif sebagai alasan utama. Analisis naratif mengungkapkan adanya persepsi umum bahwa aktivitas politik adalah domain eksklusif elit, bukan sarana partisipasi publik yang inklusif. Temuan ini menyoroti adanya hambatan struktural dan kultural yang signifikan terhadap partisipasi politik aktif di kalangan masyarakat transisi, yang berimplikasi pada kualitas demokrasi lokal dan proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Dairi. Implikasinya terhadap kualitas demokrasi lokal dan proses pemilihan kepala daerah sangat nyata, dengan potensi menciptakan siklus apatis politik yang berkelanjutan jika tidak ditangani secara sistematis. Hasil ini sama halnya dengan penelitian di Kabupaten Halmahera Utara dimana mayoritas masyarakatnya masih minim dalam keterlibatan atau partisipasi politik (Gosango, 2013).

Temuan utama penelitian ini menunjukkan adanya perkembangan signifikan dalam partisipasi politik masyarakat Kabupaten Dairi, khususnya dalam hal platform penyampaian opini yang kini telah beralih ke media sosial. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi, terjadi peningkatan sebesar 15% dalam penggunaan media sosial untuk diskusi politik selama masa kampanye Pilkada 2020 dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya. Platform seperti Facebook, Twitter, dan WhatsApp menjadi sarana utama, dengan lebih dari 60% pemilih terdaftar aktif menggunakannya untuk mencari informasi dan berdiskusi tentang kandidat. Hal ini berbeda secara substansial dengan metode tradisional seperti pertemuan tatap muka atau media cetak yang hanya menjangkau sekitar 30% pemilih. Kebebasan berekspresi di media sosial telah mendorong peningkatan

jumlah postingan terkait Pilkada sebanyak 200% dibandingkan periode sebelumnya, dengan rata-rata 1000 postingan per hari selama masa kampanye. Fenomena ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas informasi, tetapi juga memperluas partisipasi, dengan 40% pengguna media sosial melaporkan bahwa mereka merasa lebih terlibat dalam proses politik dibandingkan sebelumnya. Meskipun demikian, tantangan berupa penyebaran informasi yang tidak akurat juga meningkat, dengan 25% konten politik di media sosial teridentifikasi sebagai informasi yang menyesatkan, menurut laporan dari tim pemantau media lokal. Hasil ini menguatkan penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa penyampaian opini dapat dilakukan melalui opsi yang beragam sehingga Masyarakat berpartisipasi penuh pada aktivitas pemilihan Kepala Daerah, seperti yang terjadi di Kota Paraiman (Katarudin & Putri, 2020).

Temuan utama penelitian ini mengungkapkan peran krusial teknologi digital dan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi kebijakan selama pagelaran pesta pemilu di Kabupaten Dairi. Data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi menunjukkan peningkatan signifikan dalam penggunaan platform digital untuk diseminasi informasi pemilu, dengan kenaikan sebesar 75% dibandingkan periode pemilihan sebelumnya. Tercatat bahwa 80% penduduk Kabupaten Dairi yang berusia di atas 17 tahun memiliki akses ke smartphone dan internet, memungkinkan penyebaran informasi yang lebih cepat dan luas. KPU Kabupaten Dairi melaporkan bahwa 65% dari total informasi resmi terkait pemilu disebarluaskan melalui media sosial dan aplikasi pesan instan, mencapai sekitar 150.000 pengguna aktif. Efektivitas penyebaran informasi melalui media digital ini terbukti dengan tingkat keterlibatan (*engagement rate*) sebesar 40% pada postingan terkait pemilu di platform seperti Facebook dan Instagram. Selain itu, survei yang dilakukan oleh lembaga pemantau pemilu lokal menunjukkan bahwa 70% pemilih di Kabupaten Dairi mengandalkan media sosial sebagai sumber utama informasi tentang kandidat dan kebijakan mereka. Penggunaan teknologi digital juga memungkinkan penyampaian informasi dalam format yang lebih beragam dan interaktif, seperti infografis dan video pendek, yang mencatat tingkat penyerapan informasi 30% lebih tinggi dibandingkan metode konvensional. Meskipun demikian, tantangan berupa penyebaran informasi yang tidak terverifikasi juga meningkat, dengan 20% konten terkait pemilu di media sosial teridentifikasi sebagai informasi yang perlu diklarifikasi lebih lanjut menurut tim *fact-checking* KPU Dairi. Hasil ini sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bangka Selatan dimana penyebaran informasi lebih sering terjadi melalui pemanfaatan teknologi digital (Syafitri, 2024).

#### IV. KESIMPULAN

Secara umum tingkat literasi politik Masyarakat transisi pada pemilihan kepala daerah kabupaten Dairi masih belum optimal, terbukti dengan Kurangnya pemahaman masyarakat akan struktur dan peranan pemerintah, masyarakat yang tidak tahu terkait berita dan isu politik, bahkan sebagian masyarakat tidak memiliki ketertarikan untuk mengetahui kondisi politik

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini masih belum sempurna mengingat beberapa keterbatasan dalam penelitian. Yang paling utama adalah keterbatasan dari segi waktu penelitian yang sangat singkat. Selain itu keterbatasan anggaran juga menjadi hal pokok yang membuat penelitian ini kurang sempurna, keterbatasan juga terjadi karena ada beberapa penolakan dari Masyarakat yang enggan dimintai keterangan, dimana dengan waktu yang sangat singkat mengakibatkan hal ini menjadi sangat berpengaruh

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna. Penelitian ini lebih terfokus pada Badan Kesbangpol dimana hal ini belum terlihat pada aspek Bawaslu. Sehingga dimasa mendatang diharapkan terdapat penelitian yang secara lugas mengulas aspek tersebut

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis telah menyelesaikan penelitian ini berkat bimbingan dan karunia-Nya. Penulis menghaturkan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua atas kasih sayang dan didikan yang tak terbatas, jajaran pimpinan IPDN dan para dosen atas ilmu berharga yang telah dibagikan, serta secara khusus kepada Ibu Astika Ummy Athahirah yang telah membimbing dengan penuh dedikasi dan kebijaksanaan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua sahabat yang telah berperan dalam pembentukan karakter penulis. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi kita semua dalam perjalanan hidup dan karier masing-masing.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Athahirah, A. U. (2022). the Improvement Strategies of Political Participation for Novice Voters in Purwakarta Regency. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.24198/jwp.v7i1.36776>
- De Visser, M., & Jones, B. C. (2024). Unpacking constitutional literacy. *Global Constitutionalism*, 13(1), 29–52. <https://doi.org/10.1017/S2045381723000205>
- Gatara, A. S., & Nurjaman, K. (2017). Literasi Politik Masyarakat Pesisir Dan Manajemen Partai Politik. *Journal.Uinsgd.Ac.Id*, 7(2), 137–157. <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/article/view/2276/0>
- Gosango, R. (2013). Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halimahera Utara Tahun 2010. *Jurnal Politico*. <https://core.ac.uk/download/pdf/297682367.pdf>
- Guess, A. M., & Munger, K. (2023). Digital literacy and online political behavior. *Political Science Research and Methods*, 11(1), 110–128. <https://doi.org/10.1017/psrm.2022.17>
- Gugushvili, A. (2016). Intergenerational objective and subjective mobility and attitudes towards income differences: evidence from transition societies. *Journal of International and Comparative Social Policy*, 32(3), 199–219. <https://doi.org/10.1080/21699763.2016.1206482>
- Harden, M., & Harden, J. J. (2020). Embedding the New Information Literacy Framework in Undergraduate Political Science Courses. *PS - Political Science and Politics*, 53(2), 344–348. <https://doi.org/10.1017/S1049096519001756>
- Ilham, T., & Sari, A. G. P. (2024). Political Party Financing Regulation and Gaps for Corporate Donations: Case of the Developing Country. *Journal of Governance and Regulation*, 13(1), 28–41. <https://doi.org/10.22495/jgrv13i1art3>
- Katarudin, H., & Putri, N. E. (2020). Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilu Kota Pariaman Tahun. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(2), 70–79. <https://media.neliti.com/media/publications/346842-pengaruh-literasi-politik-terhadap-parti-1c7bb036.pdf>
- Madhok, S. (2005). Autonomy, political literacy and the social woman: Towards a politics of inclusion. *Rethinking Indian Political Institutions*, 151–168. <https://doi.org/10.7135/UPO9781843317524.009>
- Mulyana, M., & Tambunan, C. J. (2021). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Di Kabupaten Merauke. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 11(2), 240–262. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i2.2259>
- PURDEY, J., MISSBACH, A., & MCRAE, D. (2020). National University of Singapore Indonesia Indonesia: State and society in transition By. *Cambridge University Press*, 768–770. <https://doi.org/10.1017/S0022463421000862>

- Rasyid, F. A. (2023). Membangun Literasi Politik Melalui Pendidikan Untuk Pemilu Yang Bermartabat. *Siyasi: Jurnal Trias Politica*, 1(1), 27–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.1557/sjtp.v1i1.26522>
- Rosit, M., Handa, M. S., & Handayani, S. (2023). Penguatan Literasi Politik Warga Dalam Sistem Pemilu Proporsional Terbuka pada Pemilu 2024. *Journal Society*, 3, 1078–1088. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4825%0Ahttps://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/4825/3480>
- Santoso, E. B., Ilham, T., Fadhillah, H. A., & Rahmadanita, A. (2023). Pemilihan Kepala Desa Secara Digital Di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(2), 159–178. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i2.3033>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan* (3rd ed.). Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). *Metode Penelitian Kualitatif*, 1–274. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Suwenda, I. G. S., & Nyoman Diah Utari Dewi. (2024). Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Melalui Literasi Politik Berbasis Digital Pada Pemilihan Umum di Kabupaten Karangasem. *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)*, 4(1), 16–22. <https://doi.org/10.22225/jcpa.4.1.2024.16-22>
- Syafitri, A. N. (2024). Literasi Politik Masyarakat Dalam Pencegahan Politik Uang (Money Politics) di Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Eprints.Ipdn*, 11(1), 1–14. [http://eprints.ipdn.ac.id/17441/1/REPOSITORY\\_31.0253\\_Annisa Nur Syafitri rev 3.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/17441/1/REPOSITORY_31.0253_Annisa Nur Syafitri rev 3.pdf)
- Wangsih, Karina, N., & Rahmadanita, A. (2024). Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Dalam Meningkatkan Kualitas Masyarakat Pada Pemilu Yang Cerdas, Objektif, Dan Bermoral Di Kabupaten Sumedang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 50(2), 219–236. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v50i2.4845>
- Zazili, A. (2016). Pengakuan Negara Terhadap Hak-Hak Politik (Right To Vote) Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.47-81/PHPU.A-VII/2009). *Jurnal Konstitusi*, 9(1), 135. <https://doi.org/10.31078/jk916>

### Sumber Lainnya

- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik pengetahuan masyarakat tentang sistem pemerintahan daerah Kabupaten Dairi. BPS Kabupaten Dairi. <https://dairikab.bps.go.id/id/pressrelease/2020/08/04/261/indeks-demokrasi-indonesia-idi-sumatera-utara-2019-naik-3-32-poin.html>